

Digitalisasi Tata Kelola Desa Kedungprimpen Melalui Aplikasi Sistem Administrasi Persuratan dan Inventaris Aset

Mula Agung Barata¹, Ridlwan Hambali², Ifnu Wisma Dwi Prastya³,
Shofiatuz Zulfia⁴, Teguh Pribadi⁵

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri^{1,2,3,4,5}

mula.ab26@gmail.com¹, ridlwan.2020@gmail.com², ifnudwi867@gmail.com³, shofiatuzzulfia@gmail.com⁴,
pribadi.teguh90@gmail.com⁵

Abstract

Kedungprimpen Village faces various administrative challenges due to the manual management of correspondence and asset inventory, resulting in duplicated letter numbers, delayed services, and inaccurate village asset data. This community service program aims to develop and implement SI-Desaku, an integrated web- and desktop-based information system designed to support village correspondence administration and asset management in a unified manner. The implementation method includes socialization, system requirements analysis, application development, field testing, technical training, intensive mentoring, and program evaluation. The results indicate that SI-Desaku successfully eliminated letter number duplication by 100%, reduced service time from 15–30 minutes to 5–10 minutes, and provided an accurate, real-time village asset database. Furthermore, the digital literacy of village officials improved significantly, as evidenced by 90% of participants being able to operate the system independently. The implementation of SI-Desaku contributes to the realization of transparent, accountable, and sustainable village governance, while also being oriented toward improving the quality of public services.

Keywords: Asset inventory; Digitalization; SI-Desaku; Village administration.

Abstrak

Desa Kedungprimpen menghadapi berbagai kendala administratif akibat pengelolaan persuratan dan inventarisasi aset yang masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan duplikasi nomor surat, keterlambatan pelayanan, serta ketidakakuratan data aset desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SI-Desaku, yaitu sistem informasi terintegrasi berbasis web dan desktop yang mendukung administrasi persuratan dan pengelolaan aset desa secara terpadu. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, analisis kebutuhan sistem, pengembangan aplikasi, uji coba lapangan, pelatihan teknis, pendampingan intensif, serta evaluasi implementasi program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SI-Desaku mampu menghilangkan duplikasi nomor surat hingga 100%, mempercepat waktu pelayanan dari 15–30 menit menjadi 5–10 menit, serta menyediakan basis data aset desa yang akurat dan dapat dipantau secara real-time. Selain itu, literasi digital perangkat desa meningkat, ditunjukkan oleh 90% peserta yang mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Implementasi

SI-Desaku berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Administrasi desa; Digitalisasi; Inventaris aset; SI-Desaku.

A. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan layanan publik yang efektif, efisien, dan merata. Di Indonesia, desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, desa menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan pemerintah serta pelayanan langsung kepada warga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih mengandalkan sistem administrasi manual dalam pengelolaan dokumen dan data, termasuk pencatatan surat dan inventarisasi aset desa. Sistem manual ini sering kali menyebabkan berbagai kendala, seperti duplikasi nomor surat, keterlambatan layanan, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam mengakses arsip ketika dibutuhkan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa (Prihartono, et al., 2023).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, sejalan dengan konsep e-Government dan Smart Village. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Salah satu implikasi dari undang-

undang tersebut adalah terbukanya peluang bagi desa untuk mengadopsi teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Konsep Smart Village sendiri mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Geohansa et al., 2025). Implementasi e-Government di tingkat desa memungkinkan penyediaan layanan publik berbasis teknologi yang lebih cepat, tepat, dan transparan, serta memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan (Herdiana et al., 2022).

Namun, adopsi teknologi di desa tidak lepas dari tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat desa menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital, resistensi terhadap perubahan, dan minimnya dukungan teknis berkelanjutan (Hutauruk et al., 2023). Studi kasus di Sukamakmur, Bogor, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi desa tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh proses pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal.

Selain aspek administrasi persuratan, salah satu permasalahan krusial yang dihadapi desa adalah pengelolaan aset. Aset desa mencakup tanah, bangunan, peralatan, dan fasilitas lain yang dimiliki atau dikelola

oleh pemerintah desa untuk mendukung pelayanan publik. Pengelolaan aset yang baik memerlukan sistem pendataan yang akurat, transparan, dan mudah diakses. Sayangnya, di banyak desa, pengelolaan aset masih dilakukan secara manual, menggunakan buku catatan atau lembar kerja sederhana. Akibatnya, informasi tentang lokasi, kondisi, dan penanggung jawab aset sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses monitoring dan pengambilan keputusan. (Nugraha et al., 2022) menegaskan bahwa penerapan sistem manajemen aset berbasis digital, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan desa memerlukan pendekatan partisipatif. (Hamka, et al., 2023) menyoroti pentingnya collaborative governance dalam pengembangan desa digital, di mana pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta bekerja sama untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem digital yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar menjawab permasalahan yang ada, dapat dioperasikan oleh perangkat desa, dan diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, permasalahan administratif dan manajerial yang dihadapi mencakup duplikasi nomor surat dan ketidakteraturan pengelolaan aset desa akibat sistem manual yang tidak terintegrasi. Kebijakan yang memungkinkan warga mengajukan permohonan administratif melalui perangkat desa di rumah masing-

masing memang mempermudah akses layanan, tetapi berimplikasi pada ketidakteraturan pencatatan surat dan meningkatnya risiko duplikasi nomor. Selain itu, pengelolaan aset desa belum terdokumentasi secara detail terkait lokasi, kondisi, dan penanggung jawabnya.

Menjawab permasalahan tersebut, dikembangkanlah SI-Desaku (Sistem Informasi Administrasi dan Inventaris Aset Desa), sebuah aplikasi berbasis web dan desktop yang dirancang untuk mengintegrasikan manajemen administrasi persuratan dan inventarisasi aset desa dalam satu platform digital. SI-Desaku memungkinkan pembuatan dan pencatatan surat dengan nomor unik otomatis untuk mencegah duplikasi, sekaligus menyediakan modul inventarisasi aset yang mencatat informasi lengkap mengenai aset desa. Sistem ini dirancang agar dapat digunakan secara mandiri oleh perangkat desa setelah mendapatkan pelatihan, sehingga keberlanjutan implementasinya terjaga.

Pelaksanaan program pengembangan SI-Desaku dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi kepada perangkat desa, analisis kebutuhan sistem, pengembangan aplikasi, pelatihan penggunaan, uji coba lapangan, pendampingan, dan evaluasi hasil implementasi. Pendekatan ini memastikan bahwa perangkat desa tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami konsep, fungsi, dan manfaat sistem secara menyeluruh. Hasil implementasi awal menunjukkan bahwa SI-Desaku berhasil mengeliminasi potensi duplikasi surat, meningkatkan akurasi data aset, dan mempercepat proses pelayanan administrasi.

Dari sisi akademis, pengembangan SI-Desaku juga menjadi wahana pembelajaran bagi mahasiswa yang terlibat, khususnya dalam bidang rekayasa perangkat

lunak dan transformasi digital pemerintahan desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat ini sejalan dengan konsep Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), di mana mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan kompetensi profesional mereka.

Dengan demikian, penelitian dan pengabdian ini memiliki kontribusi ganda: secara praktis, memberikan solusi konkret bagi permasalahan administrasi dan manajemen aset desa; secara akademis, memperkaya literatur mengenai digitalisasi pemerintahan desa dengan studi kasus yang komprehensif dan berbasis partisipasi masyarakat. Mengingat kesamaan permasalahan yang dihadapi banyak desa di Indonesia, SI-Desaku berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Model integrasi administrasi persuratan dan inventarisasi aset ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam upaya mewujudkan desa digital yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Program pengabdian yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan implementasi sistem aplikasi SI-Desaku yang membantu pemerintah Desa Kedungprimpen dalam tata kelola persuratan dan inventarisasi aset ini dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025 di ruang pertemuan kantor Desa Kedungprimpen. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Arumanto selaku Kepala Desa Kedungprimpen dan diikuti oleh 9 orang perangkat desa mulai dari Sekretaris, Kepala Dusun, Kepala Urusan Keuangan, Umum, dan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan dan Pemerintahan. Program pendampingan dalam aspek digitalisasi desa seperti ini sudah sering dilakukan sebagai wujud

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengabdian masyarakat, seperti implementasi *Internet of Things* untuk peningkatan keamanan lingkungan di Desa Watu Gede (Subari, et al., 2026) dan peningkatan kapasitas produksi mebel dengan implementasi mesin *Computer Numerical Control* (Rosita Dwi Ferdiani, et al., 2026).

Materi dalam pelatihan yang diberikan kepada para perangkat desa meliputi pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan desa, *e-governance* dan pengenalan fungsi aplikasi SI-Desaku yang nantinya akan digunakan oleh para perangkat desa dalam pelayanan persuratan dan inventarisasi aset desa.

Metode dalam pelaksanaan program pengabdian melalui aplikasi SI-Desaku dilaksanakan melalui beberapa tahap yang terstruktur:

1. Sosialisasi

Memperkenalkan tujuan, manfaat, dan mekanisme kerja SI-Desaku kepada perangkat desa serta pihak terkait, sekaligus membangun komitmen bersama untuk mengadopsi sistem.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

Melakukan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, termasuk alur kerja persuratan dan inventarisasi.

3. Pengembangan Aplikasi

Membuat aplikasi SI-Desaku berbasis PHP (CodeIgniter 3) dan MySQL dengan desain antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.

4. Uji Coba Sistem

Melakukan pengujian langsung di lingkungan kerja desa untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan.

5. Pelatihan Perangkat Desa

Memberikan pelatihan teknis agar seluruh perangkat desa dapat mengoperasikan SI-Desaku dengan lancar, termasuk penginputan data awal dan simulasi penggunaan.

6. Pendampingan dan Evaluasi

Memberikan pendampingan selama periode awal penggunaan untuk membantu menyelesaikan kendala teknis, sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa SI-Desaku berhasil menghilangkan kasus duplikasi nomor surat, mempercepat waktu pelayanan hingga 50%, serta menciptakan basis data aset yang lengkap dan terupdate. Perangkat desa yang sebelumnya mengandalkan metode manual kini mampu mengoperasikan sistem secara mandiri, sehingga keberlanjutan penggunaan SI-Desaku dapat terjamin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, melalui pengembangan dan implementasi SI-Desaku telah menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan, baik dalam aspek administrasi persuratan maupun inventarisasi aset desa.

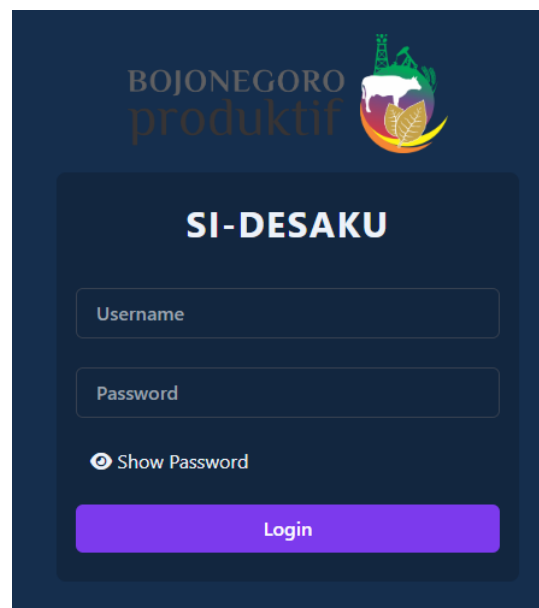
1. Peningkatan Efisiensi Administrasi Persuratan

Setelah penerapan SI-Desaku, seluruh proses pembuatan, pencatatan, dan pengarsipan surat menjadi lebih terstruktur dan cepat. Sistem penomoran otomatis yang diintegrasikan dalam aplikasi berhasil menghilangkan kasus duplikasi nomor surat yang sebelumnya kerap terjadi 2–3 kali per bulan. Waktu pelayanan surat yang sebelumnya memerlukan 15–30 menit kini

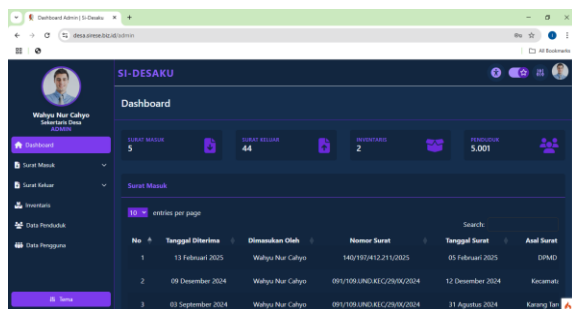
dapat dipangkas menjadi 5–10 menit, termasuk proses pencetakan dan penyimpanan arsip digital. Pencarian dokumen yang dulu membutuhkan waktu lama kini dapat dilakukan secara instan melalui fitur search pada sistem.

2. Akurasi dan Kelengkapan Data Inventaris Aset

Seluruh aset desa telah didata secara digital ke dalam sistem SI-Desaku dengan informasi detail meliputi nama barang, jumlah, lokasi, kondisi, penanggung jawab, serta riwayat pemeliharaan dan peminjaman. Dengan sistem pelacakan ini, perangkat desa dapat mengetahui status aset secara real-time. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa potensi kehilangan aset dapat ditekan karena adanya catatan pergerakan barang dan pemantauan yang lebih ketat.



Gambar 1. Tampilan Login



Gambar 2. Tampilan Dashboard Sistem

3. Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa

Pelatihan yang diberikan dalam program ini berhasil meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi berbasis web dan desktop. Berdasarkan hasil evaluasi pasca-pelatihan, 90% peserta mampu menginput data, membuat surat, dan melakukan pencarian dokumen secara mandiri. Kemampuan literasi digital perangkat desa meningkat, sehingga mereka lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan sehari-hari.



Gambar 3. Pelatihan Implementasi Aplikasi SI-Desaku

4. Transparansi dan Akuntabilitas Layanan

Implementasi SI-Desaku mendorong terciptanya sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Semua surat yang diterbitkan terekam dalam basis data terpusat, sementara log aktivitas pengguna memungkinkan pelacakan setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem. Hal ini

memperkuat aspek akuntabilitas dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dokumen atau data aset.

5. Dampak Bagi Masyarakat dan Pihak Akademik

Bagi masyarakat, manfaat yang langsung dirasakan adalah percepatan pelayanan administrasi, kemudahan pengurusan dokumen, dan adanya kepastian waktu penyelesaian surat. Bagi pihak akademik, keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan dan implementasi aplikasi memberikan pengalaman langsung dalam rekayasa perangkat lunak, manajemen proyek teknologi informasi, dan interaksi dengan mitra di lapangan.

6. Keberlanjutan Program

Perangkat desa kini mampu mengelola dan memelihara aplikasi SI-Desaku secara mandiri. Selain itu, telah dibuat prosedur standar operasional (SOP) untuk penggunaan aplikasi, sehingga memudahkan adaptasi bagi perangkat desa baru. Pemerintah desa juga berkomitmen melakukan backup data secara berkala untuk menjaga keamanan dan integritas informasi.

Adanya pengembangan aplikasi SI-Desaku menambah poin dalam bidang digitalisasi tata kelola administrasi desa bagi Desa Kedungprimpen yang akan menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan implementasi aplikasi tersebut. SI-Desaku menjadi aplikasi yang akan membantu efisiensi pekerjaan dan pelayanan dalam tata kelola administrasi persuratan Desa Kedungprimpen.

Keberhasilan implementasi SI-Desaku di Desa Kedungprimpen tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong yang bersifat teknis, sosial, sumber daya manusia (SDM), dan kebijakan. Dari aspek teknis, penggunaan platform berbasis web dan desktop dengan antarmuka sederhana serta sistem penomoran otomatis menjadi faktor

kunci yang memudahkan adaptasi perangkat desa. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti komputer dan jaringan internet yang relatif memadai turut mendukung kelancaran implementasi. Dari sisi sosial, adanya kebutuhan riil untuk mengatasi duplikasi nomor surat dan ketidakteraturan inventaris aset menciptakan urgensi kolektif untuk berubah. Dukungan kepala desa dan komitmen perangkat desa menjadi faktor penggerak utama dalam membangun budaya kerja digital. Sementara itu, pada aspek SDM, pelatihan dan pendampingan intensif meningkatkan literasi digital aparatur desa, sehingga mereka mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Dari aspek kebijakan, kesesuaian program dengan arah transformasi digital pemerintahan desa serta landasan regulatif terkait tata kelola desa memperkuat legitimasi implementasi SI-Desaku.

Di sisi lain, program ini juga menghadapi beberapa faktor penghambat. Secara teknis, potensi gangguan jaringan internet dan keterbatasan perangkat keras menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi penggunaan sistem. Dari aspek sosial, resistensi awal terhadap perubahan pola kerja manual ke digital sempat muncul, terutama terkait kekhawatiran terhadap kompleksitas sistem. Pada aspek SDM, kesenjangan kemampuan teknologi antarperangkat desa menyebabkan perlunya pendekatan pelatihan yang lebih adaptif dan bertahap. Sementara itu, dari sisi kebijakan, belum adanya regulasi desa yang secara formal mewajibkan penggunaan sistem digital berpotensi memengaruhi keberlanjutan jangka panjang apabila terjadi pergantian perangkat atau kepemimpinan. Meskipun demikian, melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan, sebagian besar hambatan tersebut dapat diminimalkan, sehingga SI-Desaku

menunjukkan potensi untuk direplikasi pada desa lain dengan karakteristik serupa.

D. PENUTUP

Simpulan

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, melalui pengembangan dan implementasi SI-Desaku (Sistem Informasi Administrasi dan Inventaris Aset Desa) telah berhasil memberikan solusi nyata terhadap permasalahan administratif dan manajerial yang sebelumnya menghambat efektivitas pelayanan publik desa. Sistem manual yang rawan duplikasi nomor surat, keterlambatan pencarian arsip, dan pencatatan inventaris aset yang tidak lengkap kini telah digantikan oleh sistem digital terintegrasi yang efisien, akurat, dan mudah dioperasikan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi waktu pelayanan, akurasi data, dan transparansi pengelolaan aset. Fitur penomoran otomatis berhasil menghilangkan sepenuhnya potensi duplikasi nomor surat, sementara sistem inventaris digital memungkinkan pemantauan aset secara real-time. Selain itu, literasi digital perangkat desa meningkat secara drastis melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga mereka mampu mengelola aplikasi secara mandiri.

Keberhasilan SI-Desaku tidak hanya memberikan manfaat teknis, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan kelembagaan yang positif. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat berkat pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lebih jauh, keterlibatan mahasiswa dalam program ini memperkuat kompetensi mereka di bidang rekayasa perangkat lunak, manajemen

proyek teknologi informasi, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan desa.

Secara keseluruhan, SI-Desaku dapat dipandang sebagai model inovasi transformasi digital desa yang berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik permasalahan serupa. Keberhasilannya membuktikan bahwa penerapan teknologi informasi di tingkat pemerintahan desa mampu meningkatkan kinerja layanan publik, mendorong akuntabilitas, dan memperkuat kapasitas kelembagaan desa.

1. Pengembangan Fitur Lanjutan

Untuk meningkatkan fungsionalitas, SI-Desaku perlu dilengkapi dengan modul tambahan seperti pelaporan keuangan desa, integrasi peta digital (GIS) untuk visualisasi lokasi aset, serta sistem notifikasi otomatis kepada warga terkait status permohonan surat.

2. Peningkatan Keamanan dan Keandalan Sistem

Implementasi automatic cloud backup dan enkripsi data perlu diprioritaskan untuk memastikan keamanan informasi dan menjaga keberlanjutan data jika terjadi kerusakan perangkat atau bencana.

3. Pelatihan Berkelanjutan

Mengingat perkembangan teknologi yang dinamis, perangkat desa memerlukan pelatihan rutin agar selalu menguasai fitur-fitur baru dan mampu menjaga kinerja optimal aplikasi.

4. Replikasi di Desa Lain

Mengingat keberhasilan implementasi di Desa Kedungprimpen, SI-Desaku dapat diperluas ke desa-desa lain di Kabupaten Bojonegoro maupun daerah lain, dengan melakukan penyesuaian kebutuhan dan kapasitas masing-masing desa.

5. Integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Untuk mendukung sinkronisasi data dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang terhubung, SI-Desaku sebaiknya diintegrasikan dengan sistem informasi kabupaten, sehingga data administrasi dan inventaris desa dapat diperbarui secara otomatis pada tingkat pemerintah daerah.

6. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah desa disarankan membuat Peraturan Desa (Perdes) yang mewajibkan penggunaan SI-Desaku sebagai sistem resmi administrasi dan inventarisasi aset desa, sehingga keberlanjutan penerapan teknologi ini dapat terjamin meskipun terjadi pergantian perangkat desa.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan digitalisasi tata kelola di Desa Kedungprimpen melalui aplikasi sistem administrasi persuratan dan inventaris aset, disarankan agar pemerintah desa terus melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas perangkat desa, penyediaan sarana teknologi informasi yang memadai, serta penguatan keamanan dan pengelolaan data agar pelayanan administrasi dan pengelolaan aset desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atas dukungan pendanaan yang telah diberikan dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Hibah Internal. Dukungan ini menjadi motivasi penting bagi kami untuk

terus berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan akademik di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Beriansyah A, Wahid M and Hartati H. 2021. Pendampingan Pengembangan Desa Digital Melalui Komunitas Pemuda Di Desa Pematang Jering Kabupaten Muaro Jambi. Reswara: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2: 13-19.
- Chastro C and Darmawan E. 2020. Perbandingan Pengembangan Front End Menggunakan Blade Template dan Vue Js. *Jurnal Strategi*. 2: 302-313.
- Geohansa NA, Sumarna A and Kania I. 2025. Digitization of Village Government as a Sustainable Development Strategy Towards the Realization of Smart Villages. *Jurnal Polisci*. 2: 254-267.
- Hamka M, Murtinah S and Giyanto A. 2023. Collaborative Governance in the Development of Digital Villages in Karanganyar Indonesia. *KnE Social Sciences*. 8: 337-361.
- Hermiati R, Asnawati A and Kanedi I. 2021. Pembuatan E-Commerce Pada Raja Komputer Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan Database MySQL. *Jurnal Media Infotama*. 17: 54-66.
- Hutauruk J, Juantara B and Fahmi I. 2023. Tantangan Transformasi Digital di Pedesaan. *Jurnal Teknologi Informasi*. 12: 33-40.
- Irwan I, Latif A and Mustanir A. 2021. Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang. GEOGRAPHY: *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*. 9: 137-151.
- Nugraha B, Mafturrahman M, Elshifa A, Putri NA and Fitriani S. 2022. Implementation of the Village Asset Management System Policy in Realizing Good Governance in Pekalongan Regency. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. 14: 159-168.
- Nurhayati E. 2023. Rancang Bangun Back-end API pada Aplikasi Mobile AyamHub Menggunakan Framework Node JS Express. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*. 11: 524-529.
- Prihartono A, Wijaya C, Wicaksana A and Amelia R. 2023. Dampak Sistem Administrasi Manual terhadap Pelayanan Publik Desa. *Jurnal Sosial Politik*. 7: 89-98.
- Yulita W, Algifari MH, Rinaldi D and Praseptiawan M. 2021. Analisis dan Rancangan User Experience Website OAIL Menggunakan Metode Task Centered System Design (TCSD). *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)*. 5: 879-886.
- Hariato, M. H. R. P. 2026. Implementasi Mesin Computer Numerical Control Berbasis Android pada Industri Mebel Pasuruan Untuk Meningkatkan kapasitas Produksi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 10:229-237.
- Subari, R. Maulidi, J. F. P. 2026. Peningkatan Keamanan Lingkungan Berbasis Internet of Think melalui Implementasi One Gate System di Desa Watugede. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 10:185-193.